

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INFLASI, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP INDEKS RATIO GINI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

Oleh

FAIZA DWI ANGZILA

NIM : G71216035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya;

Nama : Faiza Dwi Angzila

NIM : G71216035

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Jumlah
Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Terhadap Indeks Ratio Gini Jawa Timur Tahun 2013-2017.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
memang dirujuk menggunakan sumber aslinya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Faiza Dwi Angzila

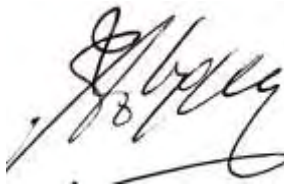
NIM. G71216035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faiza Dwi Angzila NIM. G71216035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

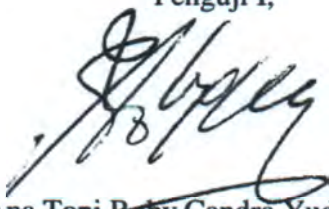
NIP. 201603311

LEMBAR PENGESAHAN

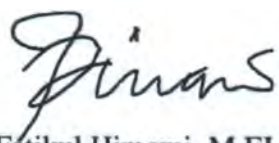
Skripsi yang ditulis oleh Faiza Dwi Angzila NIM. G71216035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

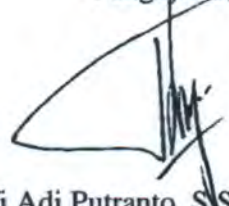
Penguji I,


Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI.,
M.SEI.
NIP. 201603311

Penguji II,


Fatikul Himami, M.El.
NIP. 198009232009121002

Penguji III,


Hanafi Adi Putranto, S.Si., S.E., M.Si.
NIP. 198209052015031002

Penguji IV,


Betty Silfia Ayu Utami, SE., M.SE.
NIP. 198706102019032019

Surabaya, 30 Maret 2020

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


H. H. Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN

d i r e k t o r i a t p e r p u s t a k a a n
M i n i s t e r i a g a m a

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAIZA DWI ANGZILA
NIM : G71216035
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / ILMU EKONOMI
E-mail address : faizaangziladwii@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INFLASI, JUMLAH PENDUDUK

MISKIN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP INDEKS

RATIO GINI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2020

Penulis

(Faiza Dwi Angzila)

nama terang dan tanda tangan

Mitridatides

rd r i r di r ri r vi i i r
i r i
d i d r d di ri i d
i i ri r r d r r r
d r r d d r
r i i i ri r vi i i i r di r
i i i d i di i
di i r ri d
di r i d r i i r r
d i i r i r i i r
i i i i i d di r vi i i i i r

9

vi

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN



Diagram illustrating the structure of the matrix M and the vector r in the context of the iterative method. The matrix M is shown as a block matrix with four rows, each containing a label: r , M , iii , and ii . The matrix is partitioned into blocks, with the top-left block being the identity matrix I and the bottom-right block being the matrix A . The vector r is shown as a column vector of size n .

BAB II KAJIAN PUSTAKA

dri
ri i
i r
i d d i i
ri i
ri M r i

BAB III METODE PENELITIAN

☐
☐
☐

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB V PEMBAHASAN

9

BAB VI KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA.....☐

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Terbalik Kuznets	25
Gambar 2.2	Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis	39
Gambar 4.1	Peta Jawa Timur	62
Gambar 4.2	Ratio Gini Jawa Timur	67
Gambar 4.3	IPM Jawa Timur	70
Gambar 4.4	Inflasi Jawa Timur	71
Gambar 4.5	Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur	74
Gambar 4.6	Scatter Diagram, Hubungan IPM dengan Gini Rasio	76
Gambar 4.7	Scatter Diagram, Hubungan Inflasi dengan Gini Rasio	82
Gambar 4.8	Scatter Diagram, Hubungan Inflasi dengan Gini Rasio	84
Gambar 4.9	Scatter Diagram, Hubungan Inflasi dengan Gini Rasio	86
Gambar 4.10	Scatter Diagram, Hubungan Inflasi dengan Gini Rasio	86
Gambar 4.11	Hasil Output Uji Normalitas	89
Gambar 5.1	Kurva Philips	101

PENDAHULUAN

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf hidup. Untuk itu, pemerintah selalu mengupayakan dengan melakukan pembangunan-pembangunan secara menyeluruh pada semua lapisan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara merata. Secara umum, pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya guna, mandiri, dan maju serta menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berlakunya kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).¹ Perubahan kebijakan atas regulasi sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebabkan karena tidak adanya lagi kesesuaian dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilakukannya revisi.²

² Ibid, Hal.1

Hakikatnya, adanya pembangunan mengindikasikan bahwa suatu negara atau daerah tersebut ingin memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengharapkan pada peningkatan kesejahteraan hidup. Pembangunan merupakan penggerak utama ekonomi dalam mendorong dan meningkatkan kualitas sumber daya dengan cara saling memperkuat, saling keterkaitan, dan terpadu dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya.³ Demikian pun, pembangunan ekonomi memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah mampu mengurangi dan meminimalisir tingkat kemiskinan, serta ketidakmerataan ketimpangan pendapatan di suatu daerah.

[illegible]

Berdasarkan definisi tersebut, maka pembangunan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur seberapa besar tingkat pertumbuhan serta tingkat pendapatan perkapita suatu daerah tersebut, dapat dilihat dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan, PDRB adalah nilai output semua barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi atau nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik.⁵ Dengan kata lain, PDRB digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan yang dihasilkan dari sektor-sektor kegiatan ekonomi pada

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), Definisi Produk Domestik Regional Bruto, Diakses Pada Tanggal 20 November 2019, Pukul 21:07 WIB.

Pada tabel 1.1 menggambarkan total PDRB atas harga konstan dan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu delapan tahun. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung mengalami fluktuatif atau peningkatan yang dicapai mengalami naik turun. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,08%. Artinya di tahun tersebut, pertumbuhannya tergolong tinggi. Namun hal itu tidak berlangsung lama, pada tahun 2014-2015, pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan sebesar 5,86% dan 5,44%.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), (diolah kembali)

Tahun	PDRB (Miliar)	Pertumbuhan (%)
2013	1.192.789,80	6,08%
2014	1.262.684,50	5,86%
2015	1.331.376,10	5,44%
2016	1.405.561,04	5,57%
2017	1.482.147,59	5,46%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), (diolah kembali)

Pada tabel 1.1 menggambarkan total PDRB atas harga konstan dan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu delapan tahun. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung mengalami fluktuatif atau peningkatan yang dicapai mengalami naik turun. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,08%. Artinya di tahun tersebut, pertumbuhannya tergolong tinggi. Namun hal itu tidak berlangsung lama, pada tahun 2014-2015, pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan sebesar 5,86% dan 5,44%.

Umumnya, permasalahan yang sering dihadapi dan mungkin terjadi pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia adalah masih tingginya tingkat kesenjangan ekonomi pada distribusi pendapatan, masih banyaknya kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. Di Jawa Timur, hampir semua Kabupaten / Kota mengalami masalah tersebut. Disparitas atau kesenjangan ekonomi pada distribusi pendapatan merupakan masalah serius yang sampai saat ini masih belum bisa untuk diminimalisir keberadaanya.

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih mengalami masalah disparitas pendapatan adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan wilayah yang terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Memiliki luas sekitar 47.799,75 km²,⁶ menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten / kota terbanyak

[illegible]

di Indonesia.⁷ Jawa Timur memiliki pertumbuhan pesat, hal itu dikarenakan letaknya yang berada pada posisi strategis dan diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Oleh karena itu, tak heran jika Jawa Timur menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri dan jalur perdagangan berbagai daerah.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan menjamin suatu wilayah kota atau daerah tersebut terhindar dari masalah disparitas atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat kesenjangan pendapatan, maka akan menyebabkan semakin tinggi jarak pemisah antara orang berpenghasilan tinggi dengan orang yang berpenghasilan rendah. Dimana, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi akan semakin sejahtera, sebaliknya masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah akan hidup serba berkecukupan dan kekurangan. Adapun, tabel ketimpangan pendapatan yang di ukur melalui Indeks Ratio Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2

Indeks Ratio Gini (IRG) Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun	IRG Jawa Timur
2013	0,36
2014	0,37
2015	0,42
2016	0,40
2017	0,40

⁷ Dokumen Pemerintahan Jawa Timur, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 20.45 WIB

Dilihat dari luas wilayahnya, Kota Surabaya menduduki peringkat kedua setelah Kota DKI Jakarta dengan memiliki luas sebesar 326,36 km². Kemudian kota / kabupaten terluas ketiga setelah Kota Jakarta dan Kota Surabaya adalah Kota Malang dengan luas wilayahnya sebesar 110,06 km². Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kota tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi (padat).

Sementara jika dilihat dari potensinya, kedelapan kota / kabupaten di Jawa Timur memiliki beragam sektor unggulan yang mampu dalam menunjang perekonomian di masing-masing kota / kabupaten tersebut. Demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya sektor unggulan di setiap masing-masing wilayah / daerah diharapkan mampu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka hal itu dapat meminimalisir tingkat disparitas atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur khususnya di delapan kota / kabupaten Jawa Timur. Berikut adalah tabel Indeks Ratio Gini delapan kota / kabupaten di Jawa Timur.

Tabel 1.3**IRG 8 Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten / Kota	Rasio Gini Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jember	0,26	0,26	0,33	0,31	0,34
kab Banyuwangi	0,30	0,29	0,34	0,33	0,34
Kab Sumenep	0,29	0,25	0,26	0,31	0,24
Kota Kediri	0,33	0,31	0,40	0,39	0,40
Kota Malang	0,38	0,37	0,38	0,41	0,42
Kota Probolinggo	0,38	0,33	0,36	0,31	0,37
Kota Madiun	0,43	0,34	0,38	0,42	0,36
Kota Surabaya	0,37	0,39	0,42	0,39	0,39

Sumber : BPS, Gini Rasio Jawa Timur Tahun 2013-2017 (diolah kembali)

Menurut Kuznets, dalam penelitiannya mengenai ketidakmerataan pendapatan mengatakan bahwa apabila nilai Indeks Ratio Gini (IRG) suatu negara atau daerah tersebut semakin mendekati angka satu, maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila nilai IRG suatu negara atau daerah tersebut semakin mendekati angka nol, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu negara atau daerah tersebut rendah atau merata ke semua lapisan masyarakat.⁸

Tingginya angka ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, yang diukur melalui Indeks Ratio Gini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi yang tidak stabil, jumlah penduduk miskin, dan tingkat

⁸ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga*, (Unit Penerbit Dan Percetakan, Yogyakarta), Hal.126

pengangguran terbuka. Keempat faktor ini memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi besar tidaknya disparitas pendapatan di Jawa Timur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani Nurlaili mengenai disparitas pendapatan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi dalam pembagian pendapatan di Pulau Jawa.⁹

Persoalan mengenai disparitas atau ketimpangan pendapatan, tidak lepas dari adanya peran sumber daya manusia (SDM) yang optimal. Disamping dalam melakukan pemerataan pembangunan guna untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerahnya, Pemerintah khususnya Jawa Timur juga harus memperhatikan seberapa optimal tingkat pembangunan manusianya. Menurut Santika, tingkat pembangunan manusia yang proposional akan dapat berpengaruh dalam mendorong peningkatan kemajuan perekonomian.¹⁰ Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pembangunan manusia, dapat diukur melalui indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 1.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun	IPM Jawa Timur
2013	67,55
2014	68,14

⁹ Ani Nurlaili, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013” Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta)

¹⁰ I Komang Oka Yasa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal.02

2015	68,95
2016	69,74
2017	70,72

Sumber : BPS, IPM Jawa Timur (diolah kembali)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indikator penting yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah. Di dalam IPM, tersusun beberapa komponen yaitu tingginya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat standart hidup yang layak.¹¹ IPM, dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu rendah jika tingkat IPM di bawah 60, sedang jika berada pada angka 60-70, tinggi jika mencapai angka 70-80, dan sangat tinggi jika berada diatas angka 80.

Pada tabel 1.4 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur. Dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Jawa Timur telah berhasil mencapai peningkatan dari tahun ke tahun (2010-2017). Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun indeks pembangunan manusai Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 70,72. Demikian, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kriteria IPM, yaitu tergolong tinggi.

¹¹ Website Resmi Badan Pusat Statistik, Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Diakses Pada Tanggal 29 November 2019, Pukul 15:32.

Selain dengan pemerataan pembangunan, tinggi rendahnya inflasi juga dapat mempengaruhi dalam mengurangi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Malang. Inflasi yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa perekonomian semakin tidak baik. Begitupun dengan inflasi yang rendah, juga akan berdampak tidak baik pada perekonomian. Sehingga dalam hal ini, inflasi yang baik adalah inflasi yang terjaga kestabilannya, atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Hal itu akan berdampak pada peningkatan laju perekonomian dan distribusi pendapatan di daerah tersebut.

Inflasi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Inflasi
2013	7,95%
2014	7,77%
2015	3,08%
2016	2,74%
2017	4,04%

Sumber : BPS, Inflasi Jawa Timur (diolah kembali)

Pada tabel 1.5 menunjukkan laju inflasi Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun. Berdasarkan tabel tersebut, laju inflasi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2013 yaitu mencapai 7,95%. Pada tahun berikutnya laju inflasi Jawa Timur mengalami penurunan selama kurun waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2014 sebesar 7,77%, 2015 sebesar 3,08, dan tahun 2016 dari 3,08% menjadi 2,74%. Penurunan tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 2017 laju Inflasi Kota Malang kembali meningkat dari 2.74% menjadi 4,04%. Demikian dapat dikatakan bahwa angka tersebut masih tergolong rendah mengingat laju inflasi kurang dari 10%.

Permasalahan disparitas atau ketimpangan pendapatan, sejatinya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pelik yang menyertainya. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya jumlah penduduk yang mengangur. Hal itu juga akan berimplikasi pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera melakukan program

pemerataan pembangunan sebagai bentuk upaya pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Miskin Dan Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2013	4893,00
2014	4748,40
2015	4789,12
2016	4703,30
2017	4617,01

Sumber : BPS, Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur (diolah kembali)

Tabel 1.7

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2013	4,30
2014	4,19
2015	4,47
2016	4,21
2017	4

Sumber: BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang (Diolah Kembali)

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dalam kurun waktu selama lima tahun. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai angka 4617,01 jiwa. Meski demikian, berkurangnya jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Timur belum tentu akan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

[illegible]

1. Dapat memahami analisa dari teori-teori yang ada (khususnya di bidang ekonomi) yakni pada teori Indeks Williamson, teori pembangunan, teori pertumbuhan ekonomi dan metode regresi sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat IRG serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
2. Melalui analisa menggunakan teori Indeks Williamson dan metode regresi, diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan pembelajaran bahwa, metode ini mampu menjawab permasalahan dan memberikan hasil untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap IRG Jawa Timur.
3. Dengan berdasar pada teori-teori yang sudah ada (teori ekonomi), penggunaan metode regresi bermanfaat untuk mengetahui hasil dari

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat ditulis melalui dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Dapat memahami analisa dari teori-teori yang ada (khususnya di bidang ekonomi) yakni pada teori Indeks Williamson, teori pembangunan, teori pertumbuhan ekonomi dan metode regresi sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat IRG serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
2. Melalui analisa menggunakan teori Indeks Williamson dan metode regresi, diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan pembelajaran bahwa, metode ini mampu menjawab permasalahan dan memberikan hasil untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap IRG Jawa Timur.
3. Dengan berdasar pada teori-teori yang sudah ada (teori ekonomi), penggunaan metode regresi bermanfaat untuk mengetahui hasil dari

1. Dapat memahami analisa dari teori-teori yang ada (khususnya di bidang ekonomi) yakni pada teori Indeks Williamson, teori pembangunan, teori pertumbuhan ekonomi dan metode regresi sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat IRG serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
2. Melalui analisa menggunakan teori Indeks Williamson dan metode regresi, diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan dan pembelajaran bahwa, metode ini mampu menjawab permasalahan dan memberikan hasil untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap IRG Jawa Timur.
3. Dengan berdasar pada teori-teori yang sudah ada (teori ekonomi), penggunaan metode regresi bermanfaat untuk mengetahui hasil dari

1. Bagi Peneliti

2. Bagi Universitas

3. Bagi Pemerintahan Daerah

[illegible]

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Lincolin Arsyad, dalam teorinya menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses atau usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui perbaikan sistem kelembagaan pada semua bidang, baik ekonomi, politik, hukum maupun sosial dan budaya.¹² Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kerjasama sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Dengan begitu maka pembangunan dapat terlaksana dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

[illegible]

Adapun, menurut Todaro, ada tiga hal yang harus menjadi sasaran utama dalam melakukan pembangunan, diantaranya adalah; a) melakukan perluasan dan peningkatan pada kebutuhan bahan dasar pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan dan perlindungan secara merata pada semua lapisan masyarakat. b) memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan sarana prasana kesehatan yang memadai. c) memperluas hubungan

[illegible]

Dengan demikian, berdasarkan kedua teori tersebut, dan dari apa yang sudah dijelaskan maka pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas, tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pada semua aspek. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah penentu akhir segalanya. Banyak faktor dan aspek lain yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan pada semua lapisan masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengertian pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya hampir sama dengan pembangunan ekonomi. Hanya saja, pembangunan ekonomi daerah ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dalam lingkup regional atau wilayahnya sementara pembangunan ekonomi mencakup secara nasional. Dalam pengertiannya, pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses atau upaya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan

¹⁴ Ibid, Hal.24

3. Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Ratio Gini (IRG)

Hakikatnya, masalah disparitas atau ketimpangan pendapatan tidak dapat dihindari, terutama pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan daerahnya, masalah ketimpangan pada distribusi pendapatan akan selalu turut menyertai. Ketidakmerataan pembangunan pada lapisan masyarakat membuat ketimpangan akan semakin meluas. Demikian, hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan secara merata pada semua lapisan daerah. salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia sekaligus tingkat pembangunan manusianya.

[illegible]

1. Indeks Williamson

Selain itu, Indeks Williamson juga menganalisa hubungan antara tingkat kesenjangan atau ketimpangan terhadap

[illegible]

perkembangan ekonomi disuatu provinsi maupun di wilayah tersebut. Menurutnya, semakin besar nilai yang dihasilkan maka semakin besar pula tingkat kesenjangan atau ketimpangan di suatu wilayah maupun di provinsi tersebut. Berikut adalah formula dari perhitungan Indeks Willamson;

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita (kabupaten/kota)

Y = PDRB perkapita (Provinsi)

f_i = Jumlah penduduk (kabupaten / kota)

n = jumlah penduduk (provinsi)

Berdasarkan rumus diatas, dari perhitungan Indeks Williamson, dapat disimpulkan bahwa ketidaksamaan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan pada lingkup regional dilihat dari awal pembangunannya. Semakin merata tingkat pembangunan, maka akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih matang dan pemusatan pada tingkat regional atau wilayah tersebut. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0-1 (positif). Semakin mendekati angka

satu maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan suatu daerah tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati angka nol maka tingkat ketimpangan semakin rendah.

2. Hipotesis Kuznets

Hipotesis ini, ditemukan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Dalam penemuannya mengenai teori ketimpangan pendapatan, Simon Kuznets menyatakan dalam hipotesisnya mengenai kurva U terbalik (*inverted U curved*). Menurutny, pada awal mulai pembangunan, distribusi pendapatan yang diterima semakin tidak merata atau belum sepenuhnya merata, namun pada saat berada atau mencapai tingkat pembangunan tertentu, pendapatan yang diperoleh akan semakin merata.¹⁷

Dilihat dari gambar kurva 2.1 menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan, kecenderungan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan semakin besar. Hal itu disebabkan karena pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya merata ke semua lapisan masyarakat, sehingga pendapatan yang diterima rendah. Begitupun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga*, (Unit Penerbit Dan Percetakan, Yogyakarta), Hal.126

Menurut Keynes, dalam teorinya berpendapat bahwa, inflasi terjadi karena gaya hidup masyarakat yang terlalu tinggi dengan kapasitas diluar batas daya belinya. Keadaan tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan menjadi tinggi, akan tetapi tidak diimbangi dengan persediaan barang-barang kebutuhan yang ditawarkan, sehingga hal itu memicu terjadinya inflasi.

Dasar pemikiran keynes menekankan pada bahasan mengenai fenomena inflasi jangka pendek. Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli rendah, mengakibatkan barang-barang yang tersedia akan di realokasikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli tinggi. Oleh karena itu, laju inflasi akan berhenti apabila kelompok masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli barang-barang pada harga yang telah berlaku, sehingga

Dasar pemikiran keynes menekankan pada bahasan mengenai fenomena inflasi jangka pendek. Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli rendah, mengakibatkan barang-barang yang tersedia akan di realokasikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli tinggi. Oleh karena itu, laju inflasi akan berhenti apabila kelompok masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli barang-barang pada harga yang telah berlaku, sehingga

Dasar pemikiran keynes menekankan pada bahasan mengenai fenomena inflasi jangka pendek. Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli rendah, mengakibatkan barang-barang yang tersedia akan di realokasikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli tinggi. Oleh karena itu, laju inflasi akan berhenti apabila kelompok masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli barang-barang pada harga yang telah berlaku, sehingga

permintaan barang-barang tidak lagi melebihi jumlah barang yang telah ditawarkan.¹⁸

4.2 Mark Up Model

Pada teori ini menjelaskan bahwa terjadinya inflasi dapat dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu biaya produksi (*Cost Of Production*) dan tambahan keuntungan (*Profit Margin*). Hubungan pengaruh kedua komponen tersebut dapat dilihat dari perubahan harga. Apabila terjadinya kenaikan harga pada kedua komponen tersebut (biaya produksi dan tambahan keuntungan), maka harga jual barang komoditi dipasar juga akan ikut naik. Akibatnya akan terjadi inflasi pada kebutuhan barang-barang di masyarakat.¹⁹

5. Hubungan Antar Variabel

5.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memiliki keterkaitan terhadap masalah disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan. Dimana, IPM dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pembangunan manusianya dalam

¹⁸ Adwin S. Atmadja, “*Inflasi Di Indonesia: sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya*”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.1 No.01, Jurnal (Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, 1999), Hal.56

¹⁹ Ibid, hal 32

memanfaatkan dan mengolah sumber-sumber atau potensi yang ada guna untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. IPM dapat dikategorikan ke dalam tiga penilaian, yaitu IPM rendah berkisar antara 10-40, sedang 40-60, tinggi berkisar antara 60-80, dan sangat tinggi mencapai angka 90 keatas. Dalam hal ini, semakin besar tingkat pembangunan manusianya maka harus pula diikuti dengan pembangunan ekonomi yang menyertainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif dan Rossy Agustin, menjelaskan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pada distribusi pendapatan.²⁰ Menurutnya, faktor yang menjadi kunci utama dalam membangun SDM atau tenaga kerja yang produktif adalah dengan melalui tingkat harapan hidup. Tingkat harapan hidup yang tinggi akan menciptakan tenaga kerja yang produktif, yang mana di kemudian hari akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Akan tetapi, meningkatnya pendapatan per kapita belum merata ke semua lapisan daerah. pendapatan tersebut hanya mengelompok pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata dan

²⁰ Muhammad A, Rossy Agustin, “Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, Jurnal (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah Surakarta), Hal.326

Inflasi merupakan suatu fenomena dalam ekonomi makro yang tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang kebutuhan secara umum. Inflasi terjadi disebabkan karena meningkatnya pendapatan atau penghasilan tetapi tidak diikuti oleh pertambahan jumlah produksi barang-barang. Sampai saat ini, masalah inflasi masih menjadi hal yang menakutkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil.

²¹ Benni Ratriadi, “Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten.Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang), Hal.25

diatasnya 30% melainkan inflasi yang tetap terjadi. Menurut Benni, mengatakan bahwa inflasi tingginya berdampak negatif bagi perkembangan perekonomian tersebut. Salah satunya adalah dapat memperburuk pendapatan.²² Artinya, saat terjadi inflasi tinggi pada rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kinerja yang akan dihasilkan, sehingga hal itu menimbulkan kondisi ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian inflasi memiliki keterkaitan terhadap ketidakefektifan distribusi pendapatan di suatu wilayah tersebut.

diatasnya 30% melainkan inflasi yang tetap terjadi.²¹ Menurut Benni, mengatakan bahwa inflasi tingginya memiliki dampak negatif bagi perkembangan perekonomian tersebut. Salah satunya adalah dapat memperburuk pendapatan.²² Artinya, saat terjadi inflasi tinggi pada rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kinerja yang akan dihasilkan, sehingga hal itu menimbulkan kondisi ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian inflasi memiliki keterkaitan terhadap ketidakefektifan distribusi pendapatan di suatu wilayah tersebut.

diatasnya 30% melainkan inflasi yang tetap terjadi.²¹ Menurut Benni, mengatakan bahwa inflasi tingginya memiliki dampak negatif bagi perkembangan perekonomian tersebut. Salah satunya adalah dapat memperburuk pendapatan.²² Artinya, saat terjadi inflasi tinggi pada rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kinerja yang akan dihasilkan, sehingga hal itu menimbulkan kondisi ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian inflasi memiliki keterkaitan terhadap ketidakefektifan distribusi pendapatan di suatu wilayah tersebut.

²³ Website Resmi Badan Pusat Statistik, Definisi Kemiskinan, Diakses Pada Tanggal 30 November 2019, Pukul 15:01 WIB.

Di Indonesia, pengangguran dikelompokkan berdasarkan macam-macam jenis dan bentuknya. Menurut Sukirno (2000), pengangguran dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu pengangguran friksional, struktural, dan konjungtor. Sementara, dilihat dari bentuk penganggurannya ada pengangguran terbuka, setengah pengangguran, tenaga kerja yang lemah, dan tenaga kerja yang tidak produktif.

[illegible]

Persoalan mengenai pengangguran dan ketimpangan tidak dapat dihindari. Keduanya memiliki hubungan dalam menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerahnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ganis, menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.²⁶ Oleh karena itu, maka menurut Arsyad, untuk mengurangi atau meminimalisir tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan pada negara berkembang adalah dengan memberikan upah yang layak dan memadai serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin atau tidak berdaya.²⁷

²⁷ Ibid, Hal.26

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Akan tetapi pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik dari segi variabel penelitian, data tahun yang diperoleh maupun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adanya penelitian terdahulu, digunakan peneliti sebagai pendukung dalam kevalidan penelitian, sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh peneliti lain untuk dapat mengembangkan serta menjadikan penelitiannya semakin relevan.

aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di daerah Provinsi Jawa Tengah.²⁸

2. Penelitian selanjutnya mengenai ketimpangan pendapatan diteliti oleh Ani Nurlaili (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan mengambil data crossection 6 provinsi se Jawa timur dan time series melalui pendekatan regresi *Fixed Effect Model*. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah PDRB per kapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.²⁹
3. Benni Ratriadi (2009), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007”. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linear Berganda dan Indeks Williamson. Dimana variabel dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi, dan pengeluaran

²⁸ Annisa Ganis, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro)

²⁹ Ani Nurlaili, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013” Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta)

4. Darzal, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Disparitas Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Provinsi Jambi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel Dan Indeks Williamson. Variabel yang diteliti adalah PDRB per kapita, belanja langsung, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Dari hasil analisa regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel belanja langsung dan TPAK terhadap pendapatan per kapita. Sementara hasil perhitungan

[illegible]

menggunakan Indeks Willamson tingkat disparitas sebesar 0,401. Artinya bahwa, ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi tergolong tinggi, sehingga penelitian ini diteliti.³¹

5. Penelitian selanjutnya oleh Didin Fatihudin dan Nurul Laili Mauliddah yang berjudul “*Expenditure On Education, Health And PDRB Per Capita On The Gini Ratio City In The East Java Province Of Indonesia*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, sektor kesehatan, dan PDRB per kapita terhadap *Indeks Ratio Gini* di 38 kota Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Untuk mendukung perhitungan analisa ini maka digunakan variabel PDRB per kapita, belanja untuk pendidikan, dan tingkat kesehatan. Berdasarkan penelitian ini, hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan masing-masing kabupaten / kota memiliki kesenjangan yang berbeda-beda. Tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan tertinggi adalah dari kota malang, kota madiun, kota blitar, dan kota pasuruan. Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan, dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap rasio gini atau tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

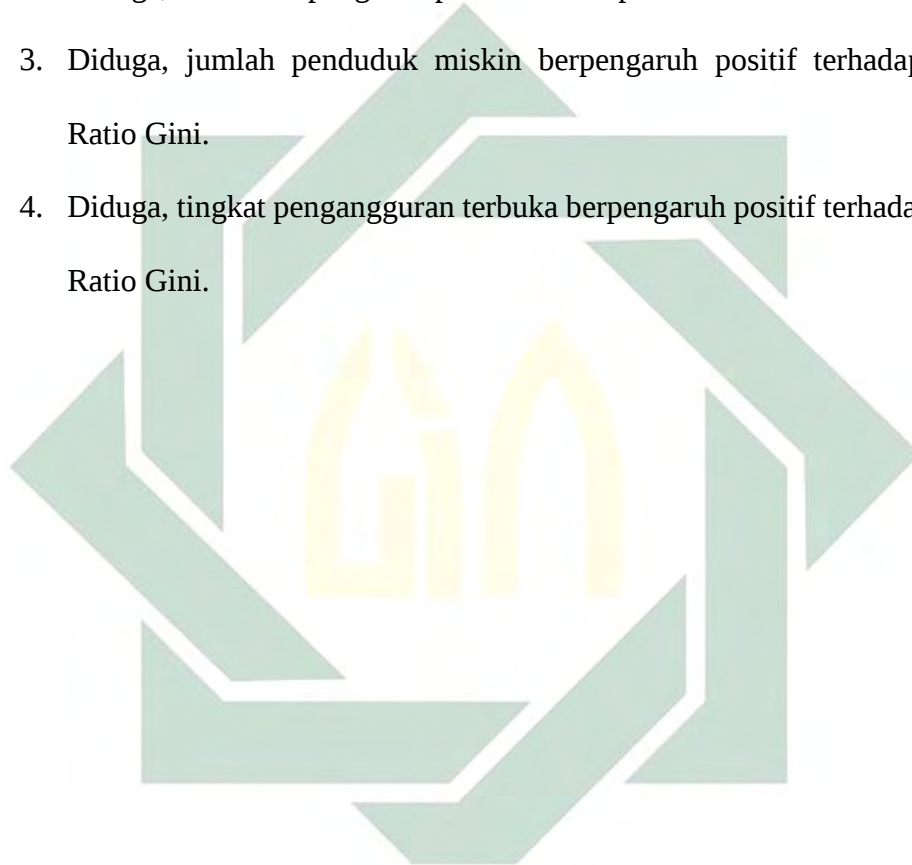
³¹ Darzal, “*Analisis Disparitas Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Diprovinsi Jambi*”, Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Vol.4 No.2, 2016.

Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan, dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan secara merata pada semua lapisan daerah. Adanya pemerataan pembangunan mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut ingin memperbaiki kondisi perekonomiannya. Dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam undang-undang otonomi daerah, pemerintah dapat mengoptimalkan melalui sumber daya manusia yang ada untuk meminimalisir tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Demikian, diharapkan hal itu akan dapat tercapai kesejahteraan hidup bagi masyarakat-masyarakatnya.

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara, dimana dugaan tersebut sebaiknya bisa salah dan juga bisa benar. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, serta alur kerangka berpikir, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

[illegible]

1. Diduga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Indeks Ratio Gini.
2. Diduga, Inflasi berpengaruh positif terhadap Indeks Ratio Gini.
3. Diduga, jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap Indeks Ratio Gini.
4. Diduga, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap Indeks Ratio Gini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, terdapat dua jenis penelitian yang biasa digunakan oleh peneliti, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan studi wawancara untuk memperoleh data informasi berupa penjelasan secara langsung oleh narasumber yang ingin diteliti. Sementara penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka sebagai bahan analisa yang berupa data statistika dan dapat diambil melalui lembaga resmi / tertentu.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelatif dan deskriptif. Dimana, penelitian ini menguji keterkaitan atau hubungan antara dua variabel atau lebih dengan metode analisa yang disajikan berupa angka-angka dalam bentuk data dengan menambahkan keterangan berupa kalimat penjelas deskriptif dari data kuantitatif.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini, mengambil data makro Indonesia dengan kurun waktu selama lima tahun yaitu 2013-2017. Untuk tempat penelitiannya, dilaksanakan di Indonesia dengan objek yang diteliti adalah Provinsi Jawa Timur.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

D. Variabel Penelitian

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Definisi Populasi*, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019, Pada Pukul 15:35 WIB.

[illegible]

1. Indeks Ratio Gini (IRG)

Ketimpangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan. Ketimpangan dapat terjadi dalam perekonomian yaitu pada ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ekonomi ketidakmerataan pembagian pendapatan pada lapisan masyarakat. Masalah ketimpangan ekonomi merupakan salah satu hal yang sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

[illegible]

dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah atau daerah, yaitu Indeks Williamson dan hipotesis kurva terbalik U Kuznet.

Dalam perhitungannya melalui Indeks Williamson, yaitu dengan membandingkan dan menghitung seberapa besar jumlah pendapatan penduduk perkapita dalam lingkup nasional (provinsi) dan jumlah pendapatan penduduk perkapita dalam lingkup regional (kabupaten/kota). Sementara, pada hipotesis Kuznet mengenai ketimpangan pendapatan, dapat digambarkan melalui kurva U terbalik. Kurva U terbalik, menunjukkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan antara angka 0 sampai 1. Semakin mendekati angka nol, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tersebut rendah. Begitupun sebaliknya, jika semakin mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan pendapatan tersebut akan semakin melebar yang mungkin bisa menyebabkan jarak pendapatan antara orang berpenghasilan tinggi, dengan orang yang berpenghasilan rendah semakin besar.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur seberapa besar tingkat pembangunan manusia. Melalui publikasi dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), IPM digagas dan diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pengukuran IPM didasarkan pada tiga

pilar yaitu standar hidup yang layak, pendidikan / pengetahuan, dan kesehatan. Berikut adalah formula IPM.³⁴

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusianya, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), metode yang digunakan sebagai perhitungan IPM adalah dengan melihat angka harapan lama sekolah dan Produk Nasional Bruto (PNB). Pergantian pada perhitungan sebelumnya, yaitu angka melek huruf dan Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan bahwa sudah tidak adanya lagi kesesuaian terhadap faktanya.

Angka melek huruf tidak bisa dijadikan lagi sebagai ukuran dalam menentukan IPM, sebab sudah tidak relevan dalam menentukan tingkat kualitas pendidikan yang didapatkan pada setiap antardaerah. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB), tidak dapat lagi menggambarkan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut, melainkan PNB dianggap lebih relevan menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut. Demikian maka perhitungan IPM menggunakan rata-rata geometrik dengan didasarkan pada ketiga

³⁴ Website Resmi Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019, Pukul 11.11 WIB.

komponen, diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan standart hidup yang layak.³⁵

3. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi juga dapat diartikan sebagai naiknya jumlah uang yang beredar pada masyarakat sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam perekonomian. Menurut Bank Indonesia, untuk mengukur tingkat inflasi dalam suatu perekonomian adalah dengan menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam pengertiannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan IHK sebagai suatu metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis tingkat / laju inflasi dalam bentuk persentase. Adapun formulanya adalah sebagai berikut.

$$INF_t = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

INF_t = Inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun)

IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun)

³⁵ Ibid, Hal.53, *Metode Perhitungan IPM*

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

[illegible]

sedang mencari pekerjaan ataupun sudah diterima kerja tetapi belum mulai bekerja.³⁷

F. Uji Validitas dan Reabilitas

Menurut Ghozali, uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan suatu kuisioner. Kuisioner dianggap valid jika isi pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan kejadian atau sesuatu yang akan di ukur.³⁸ Sementara uji realibilitas dalam statistika digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan komponen atau bagian dari variabel. Suatu kuisioner dapat dikatakan *reliabel* (dapat dipercaya/handal) jika jawaban dari responden atau seseorang dalam isi pertanyaan kuisioner tersebut konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.³⁹

G. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari publikasi lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini mencakup data yang telah dipublikasi oleh BPS (data terbaru) berupa Indeks Ratio Gini, Indeks

³⁷ Badan Pusat Statistik, Definisi Pengangguran, Dikutip Pada Tanggal 7 Desember 2019 Pukul 14:03 WIB

³⁸ Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), Hal.52

³⁹ Ibid, Hal.

Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur atas harga konstan tahun 2010-2017.

H. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode untuk memperoleh fakta berupa data-data yang mampu untuk mengungkapkan kenyataan atau kondisi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik / metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa dokumentasi yang bersumber dari instansi / lembaga resmi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut berbentuk data sekunder, yang telah dipublikasi dan didokumentasi oleh BPS, dimana berisikan data terbaru (data yang telah diperbarui).

I. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis dengan regresi model data panel. Data panel merupakan penggabungan dari data *cross section* (silang tempat) dan *time series* (silang waktu). Menurut Widarjono, ada beberapa keuntungan dalam menggunakan analisa metode regresi data panel, diantaranya; a) menggabungkan dua data *cross section* dan *time series* dalam jumlah data yang lebih banyak akan menghasilkan *degree of freedom* (derajat kebebasan) lebih besar. b) Menggabungkan informasi dari data *cross section*

dan *time series* dapat mengatasi masalah atau penyimpangan yang timbul ketika ada variabel yang hilang.⁴⁰

Metode regresi data panel dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini adalah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Ratio Gini (IRG). Adapun model fungsi yang akan dipakai untuk mengetahui dan menganalisis tingkat disparitas atau ketimpangan (IRG) di Jawa Timur pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

$$Y_{\text{Indeks Gini Ratio}} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 JPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{IRG} = Variabel ketimpangan pendapatan (IRG)

$IPM (X_1)$ = Variabel Indeks Pembangunan Manusia

$INF (X_2)$ = Variabel Inflasi

$JPM (X_3)$ = Variabel Jumlah Penduduk Miskin

$TPT (X_4)$ = Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

i = *Cross section*

⁴⁰ Widarjono, Agus, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasi Disertai Panduan eviws*, (UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2017), Hal.235

t = Time series

 β = Koefisien

e = error term

Dalam metode analisa regresi panel, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk menguji data diantaranya adalah model *Fixed Effect Last Square Dummy Variabel* (LSDV), model *Fixed Effect Within Groub*, OLS *pooled*, dan *random effect*. Model uji tersebut akan digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan peneliti sebagai acuan. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu melakukan uji spesifikasi model melalui uji chow dan uji hausman.

1. Uji Spesifikasi Model Regresi Panel

1.1 Uji Chow

Dalam model regresi panel, uji chow digunakan untuk menentukan model yang baik diantara model fixed effect atau model common effect. Untuk mengetahuinya dapat dilihat hasil uji pada Chi-square. Jika Chi-square menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka sebaiknya model yang tepat digunakan adalah *common effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka sebaiknya model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Model spesifikasi selanjutnya adalah uji hausman. Pada regresi uji hausman digunakan sebagai penentuan model manakah yang diantara *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model*). Untuk penentuannya, digunakan hipotesis H_0 dan H_a . Dimana, H_0 adalah hipotesis untuk *Random Effect Model* dan H_a adalah hipotesis *Fixed Effect Model*.

Jika hasil uji hipotesis menunjukkan H_0 ditolak, maka model yang digunakan adalah FEM. Sebaliknya pun, jika H_a diterima maka model yang digunakan adalah REM.

2.1 Uji Multikolonieritas

Dalam regresi, uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Menurut Ghazali, mengatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi hubungan korelasi antar variabel independen. Namun, apabila ditemukan variabel independen tersebut saling berkorelasi, maka nilai korelasi antar variabel sama dengan nol.⁴¹

Untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi antar variabel tersebut, dapat dilihat dengan berapa besar nilai R^2 .⁴² Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh koefisien R^2 , maka diindikasikan terjadinya multikolineritas antar variabel tersebut. Selain dilihat dari nilai R^2 , masalah multikolinearitas dapat juga dilihat melalui nilai T (Tolerance) dan Variance Inflation Factor (VIF), yang mana nilai dari indikator tersebut tidak lebih dari 0,8.

2.2 Uji Autokorelasi

Uji selanjutnya untuk mengetahui adanya suatu penyimpangan antar variabel adalah uji autokorelasi. Dalam statistika, uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat adanya faktor-faktor kesalahan pengganggu pada periode waktu dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya. Ghazali, (2013) menyatakan pendapatnya dalam karya bukunya, bahwa autokorelasi muncul dan terjadi karena adanya pengamatan atau observasi yang saling berkaitan satu sama lain dengan masa yang berurutan sepanjang waktu. Menurutnya, terdapat beberapa cara untuk mengetahui dan mendeteksi ada tidaknya kesalahan pengganggu antar variabel atau autokorelasi, diantaranya adalah uji Durbin Waston

⁴² Annisa Ganis, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah*”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro), Hal.68

2.3 Uji Heterokesdatisitas

Menurut Ghozali (2013), untuk mengetahui atau mendeteksi ada tidaknya suatu penyimpangan heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot dan uji park. Grafik plot digunakan untuk melihat prediksi antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Sementara uji park dengan melihat nilai residualnya dengan meregresi dikuadratkan atau dilogartimkan dengan variabel bebas. Jika $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ maka dapat dikatakan terjadinya heteroskedastisitas. Jika $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$ maka dikatakan tidak

⁴³ Ibid, Hal.60

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.⁴⁴

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normal tidaknya suatu data dilihat dari probabilitas Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas Jarque-Bera $> 5\%$ menunjukkan data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas $< 5\%$ maka data tidak berdistribusi secara normal.

3. Uji Hipotesis Statistik

Dalam uji statistik, koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi mampu untuk menjelaskan datanya. Garis regresi dikatakan baik dan sempurna apabila data terletak sesuai pada garis regresi, atau nilai residual adalah nol. Untuk mengukur koefisien determinasi dapat digunakan formula sebagai berikut.

[illegible]

$$R^2 = \frac{\sum(Y_1 - Y)^2}{\sum(Y_1 - Y)^2}$$

didefinisikan sebagai proporsi atau jumlah persentase dari total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh garis regresi variabel independen atau variabel X. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu, dimana $0 < R^2 < 1$. Semakin nilai koefisien mendekati angka satu maka semakin baik garis regresi sebab mampu untuk menjelaskan data aktualnya. Sebaliknya, jika semakin mendekati angka nol maka garis regresi yang ditunjukkan kurang baik.

3.2 Uji Statistik t (Signifikasi Secara Parsial)

pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (Y) secara individual. Menurut Gujarati, menjelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji hipotesis pada setiap variabel. Uji t digunakan untuk membandingkan nilai t hitung dengan t H_0 . Jika nilai t hitung > dari nilai t tabel, maka menunjukkan H_0 ditolak atau menerima H_1 . Dimana, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung < dari nilai t tabel, maka H_0 gagal ditolak.

$H_0 =$ menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X_1), inflasi (X_2), jumlah penduduk miskin (X_3), tingkat pengangguran terbuka (X_4), diduga tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan atau Indeks Ratio Gini (Y).

$H_1 =$ menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X_1), inflasi (X_2), jumlah penduduk miskin (X_3), tingkat pengangguran terbuka (X_4), diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan atau Indeks Ratio Gini (Y).

Uji statistik F digunakan untuk mengukur semua variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia (X_1), inflasi (X_2), jumlah penduduk miskin (X_3) dan tingkat pengangguran terbuka (X_4) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi Indeks Ratio Gini (IRG).

$$F_1 = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)}$$

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel penjelas (konstanta)

[illegible]

HASIL PENELITIAN

1. Profil Provinsi Jawa Timur

Dilihat secara astronomis, wilayah Provinsi Jawa Timur terletak pada $111,1^{\circ}$ - $114,4^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,12^{\circ}$ - $8,48^{\circ}$ Lintang selatan.⁴⁶ Wilayah ini tergolong memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dimana, Kota Surabaya menjadi ibukota untuk Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai daerah provinsi yang memiliki jumlah

⁴⁶ Statistik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur I Tahun 2008, Hal.1

Sidoarjo, Gresik, Tuban, Lamongan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan dataran tinggi yang sering kita jumpai berada di daerah Kota Batu, Malang, dan Lumajang.

Selain itu, Jawa Timur juga memiliki wilayah yang beranekaragam seperti pegunungan, perbukitan, maupun kepulauan. Sehingga hal itu menjadikan wilayah Jawa Timur beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata sekitar 21° - 35° celsius. Sebagian wilayah yang merupakan dataran rendah memiliki rata-rata suhu antara 30° - 35° C. Sementara wilayah yang sebagian besar berada di pegunungan atau dataran tinggi memiliki rata-rata suhu berkisar antara 15° - 20° C.

Berbicara mengenai gunung, wilayah Jawa Timur memiliki beberapa gunung yang masih aktif dan tidak aktif. Beberapa gunung yang masih aktif diantaranya adalah Gunung Semeru, Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Raung, Dan Gunung Welirang. Selain memiliki beberapa gunung yang masih aktif, terdapat juga gunung yang sudah tidak aktif, diantaranya adalah Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, Dan Gunung Lawu.

Selain pegunungan, wilayah Jawa Timur juga terdapat beberapa pantai yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata atau destinasi liburan. Pantai-pantai tersebut diantaranya yaitu Pantai Balekambang, Pantai Pasir

2. Demografi / Penduduk Jawa Timur

Kepadatan penduduk biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Kota Surabaya. Dilihat menurut tempat tinggalnya, penduduk Jawa Timur

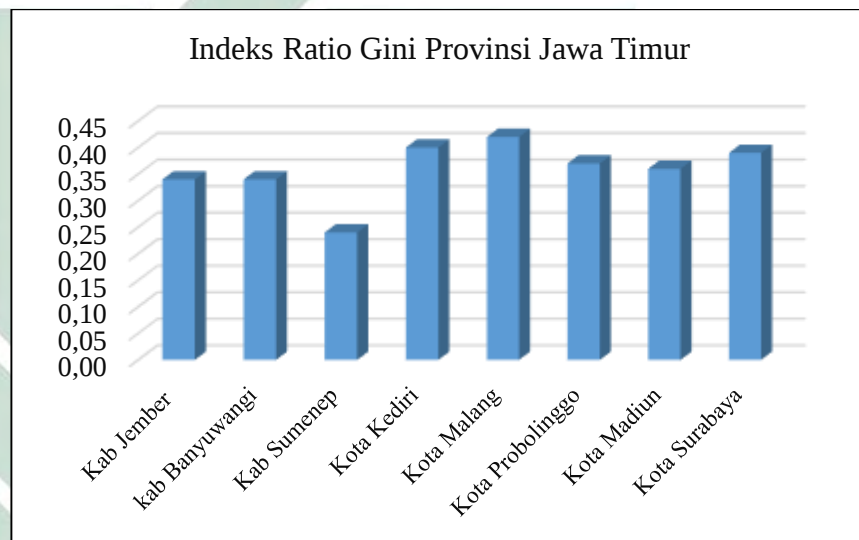
⁵¹ Dewa, N. Cakrawala, Et.Al., Statistik Penduduk, Hal. 6-8

Selain itu, adanya perbedaan mata pencaharian antara penduduk pedesaan dengan penduduk perkotaan. Rata-rata penduduk Jawa Timur yang hidup di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, guru, dan buruh pabrik. Sedangkan penduduk yang hidup di perkotaan bermata pencaharian sebagai karyawan kantor, PNS, serta berprofesi lainnya.

3. Gini Ratio (Y)

Menurut Simon Kuznet, Indeks Ratio Gini suatu negara atau daerah jika semakin mendekati angka satu, maka tingkat kesenjangan atau

ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila nilai IRG suatu negara atau daerah tersebut semakin mendekati angka nol, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu negara atau daerah tersebut rendah atau merata ke semua lapisan masyarakat.⁵²



Gambar Grafik 4.2

IRG Jawa Timur Tahun 2013-2017

Implementasi nilai koefisien gini untuk negara yang tingkat kesenjangannya diatas 0,5 keatas, mengindikasikan bahwa tingkat disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau daerah tersebut tergolong tinggi atau semakin tidak merata. Sementara, nilai koefisien gini yang berada pada kisaran angka 0,2 sampai 0,3,

⁵² Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga*, (Unit Penerbit Dan Percetakan, Yogyakarta), Hal.126

mengindikasikan bahwa tingkat disparitas atau ketimpangan pendapatan di suatu negara atau daerah tersebut relatif terdistribusi merata pada semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2017 Rasio Gini tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang yaitu sebesar 0,42. Sementara, Rasio Gini terendah adalah Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 0,24. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, implementasi nilai koefisien gini Kabupaten Malang mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di daerah tersebut semakin tidak terdistribusi merata. Sementara, nilai koefisien gini untuk Kabupaten Sumenep memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan di daerah tersebut terdistribusi merata.

Tabel 4.1

Rasio Gini Jawa Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	Rasio Gini Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jember	0,26	0,26	0,33	0,31	0,34
kab Banyuwangi	0,30	0,29	0,34	0,33	0,34
Kab Sumenep	0,29	0,25	0,26	0,31	0,24
Kota Kediri	0,33	0,31	0,40	0,39	0,40
Kota Malang	0,38	0,37	0,38	0,41	0,42
Kota Probolinggo	0,38	0,33	0,36	0,31	0,37

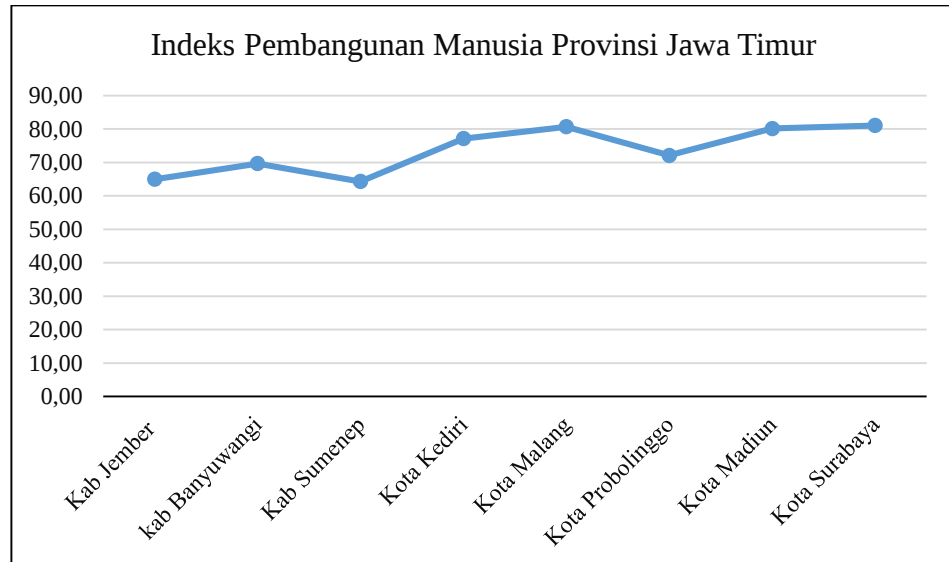
Kota Madiun	0,43	0,34	0,38	0,42	0,36
Kota Surabaya	0,37	0,39	0,42	0,39	0,39

Sumber : BPS, Indeks Ratio Gini Jawa Timur Tahun 2013-2017

4. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator atau alat untuk mengukur seberapa tinggi atau optimal tingkat pembangunan manusianya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indikator penting yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah. Dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan manusianya, IPM dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu rendah jika tingkat IPM di bawah 60, sedang jika berada pada angka 60-70, tinggi jika mencapai angka 70-80, dan sangat tinggi jika berada diatas angka 80.⁵³ Berikut adalah gambar grafik IPM Jawa Timur.

⁵³ Website Resmi Badan Pusat Statistik, Definisi IPM, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 11.23.



Gambar Grafik 4.3

IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017 Indeks Pembangunan tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Surabaya yaitu sebesar 81,07. Sementara Indeks Pembangunan terendah adalah Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 64,28. Tingginya Tingkat Pembangunan Manusia di Kota Surabaya, tidak lepas dari peran sumber daya manusianya yang berkualitas. Namun, bukan berarti pembangunan manusia di Kabupaten Sumenep belum berkualitas, melainkan belum mampu dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Adapun tabel IPM dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 4.2

IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	IPM Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jember	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96
kab Banyuwangi	66,74	67,31	68,08	69,00	69,64
Kab Sumenep	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28
Kota Kediri	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13
Kota Malang	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65
Kota Probolinggo	70,05	70,49	71,01	71,50	72,09
Kota Madiun	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13
Kota Surabaya	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07

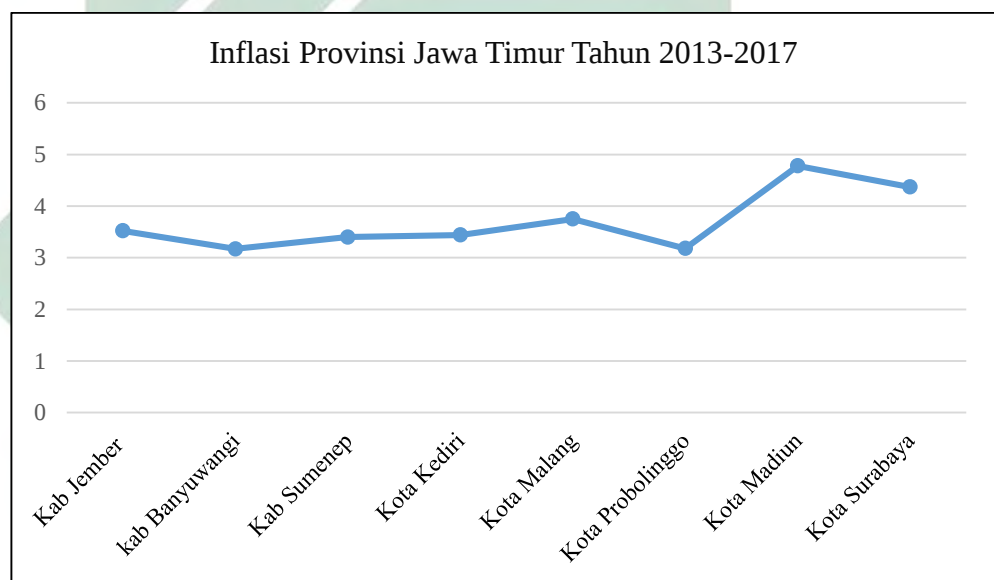
Sumber : BPS, IPM Jawa Timur Tahun 2013-2017

5. Inflasi (X2)

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang kebutuhan secara umum. Inflasi terjadi disebabkan karena meningkatnya pendapatan atau penghasilan tetapi tidak diikuti oleh pertambahan jumlah produksi barang-barang. Keadaan tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan menjadi tinggi serta tidak diimbangi dengan persediaan barang-barang kebutuhan yang ditawarkan, sehingga hal itu memicu terjadinya inflasi.⁵⁴

⁵⁴ Adwin S. Atmadja, “Inflasi Di Indonesia: sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.1 No.01, Jurnal (Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, 1999), Hal.56

Menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa pada tahun 2018, inflasi Jawa Timur berada pada kisaran angka 2,86%.⁵⁵ Hal tersebut tergolong rendah, namun hal itu bisa menjadi tinggi apabila tidak dipantau dan dijaga kestabilannya. Sebab, inflasi yang baik adalah inflasi yang tidak lebih dari 10% dan 30%.



Gambar grafik 4.4

Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar grafik diatas, pada tahun 2017 inflasi tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Madiun yaitu sebesar 4,78 persen. Sementara inflasi terendah di Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu

⁵⁵ Website Resmi Badan Pusat Statistik, Inflasi Di Jawa Timur Tahun 2018, Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2020, Pukul 23.09.

sebesar 3,17. Hal itu menunjukkan bahwa inflasi kota / kabupaten di Jawa Timur rendah atau tidak lebih dari 10%. Namun, hal itu masih belum dikatakan baik, sebab inflasi yang baik adalah inflasi yang tetap terjaga kestabilannya, tidak rendah juga tidak tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017.

Tabel 4.3

Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	Inflasi Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jember	7,21	7,52	2,31	1,93	3,52
kab Banyuwangi	0	6,59	2,15	1,91	3,17
Kab Sumenep	6,62	8,04	2,62	2,19	3,4
Kota Kediri	8,05	7,49	1,71	1,3	3,44
Kota Malang	7,92	8,14	3,32	2,62	3,75
Kota Probolinggo	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18
Kota Madiun	7,52	7,4	2,75	2,25	4,78
Kota Surabaya	7,52	7,9	3,43	3,22	4,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, Inflasi Jawa Timur

6. Jumlah Penduduk Miskin (X3)

Permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan tidak lepas dari masalah kemiskinan yang menyertai. Kemiskinan terjadi disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi, namun lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Di Jawa Timur, diperkirakan jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan. Hal tersebut

disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah banyaknya penduduk luar pulau yang migrasi ke Pulau Jawa khususnya Jawa Timur. Selain itu angka kelahiran di Jawa Timur juga tinggi, sehingga tidak heran jika Jawa Timur dijuluki sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Berikut adalah gambar grafik jumlah penduduk miskin Jawa Timur.



Gambar Grafik 4.5

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 266,90. Kemudian Kabupaten Banyuwangi dengan total jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 138,54. Sementara Kabupaten Madiun memiliki jumlah penduduk miskin paling rendah yaitu sebanyak 8,70.

Untuk mengetahui penjelasan selanjutnya, berikut adalah tabel jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jember	278,50	270,40	269,54	265,10	266,90
kab Banyuwangi	152,20	147,70	146,00	140,45	138,54
Kab Sumenep	225,50	218,90	216,84	216,14	211,92
Kota Kediri	22,80	22,10	23,77	23,64	24,07
Kota Malang	41,00	40,60	39,10	37,03	35,89
Kota Probolinggo	19,20	19,00	18,66	18,37	18,23
Kota Madiun	8,70	8,50	8,55	9,05	8,70
Kota Surabaya	169,40	164,40	165,72	161,01	154,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (X4)

Persoalan mengenai pengangguran dan ketimpangan tidak dapat dihindari. Keduanya memiliki hubungan dalam menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerahnya. Oleh karena itu, maka untuk mengurangi atau meminimalisir tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan pada negara berkembang dapat dilakukan dengan memberikan upah yang layak dan memadai serta

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jember	3,94	4,64	4,77	5,21	5,16
kab Banyuwangi	4,65	7,17	2,55	4,43	3,07
Kab Sumenep	2,56	1,01	2,07	2,00	1,83
Kota Kediri	7,92	7,66	8,46	8,22	4,68
Kota Malang	7,73	7,22	7,28	6,91	7,22
Kota Probolinggo	4,48	5,16	4,01	3,96	3,42
Kota Madiun	6,57	6,93	5,10	5,12	4,26
Kota Surabaya	5,32	5,82	7,01	7,29	5,98

B. Analisis Data

Teknik analisis penentuan model data panel dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model uji, salah satunya yaitu melalui Uji Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang baik di antara model *fixed effect* atau *common effect* dengan asumsi bahwa:

[illegible]

H_1 : *Fixed Effect*

Dari asumsi tersebut, untuk mengetahui hasil uji di antara *common effect* atau *fixed effect* dapat dilihat hasil uji pada Chi-Square. Jika Chi-square menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka sebaiknya model yang tepat digunakan adalah *common effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka sebaiknya model yang digunakan adalah *fixed effect*.⁵⁶

Tabel 4.6

Hasil Output Chi - Square

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.374328	(7,28)	0.9095
Cross-section Chi-square	3.578343	7	0.8269

Sumber : Diolah Melalui Eviews 10, Hasil Output Uji Chow.

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan Eviews 10, dapat diketahui bahwa hasil output *Chi-Square* yaitu sebesar 0,8269. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau menerima H_0 dan menolak H_1 . Sehingga dapat dikatakan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect*.

⁵⁶ Agus Widardjono, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews*, (UPP STIM YKPN : Yogyakarta), 2017, Hal.253

R-squared	0.749324	Mean dependent var	0.347000
Adjusted R-squared	0.720675	S.D. dependent var	0.051947
S.E. of regression	0.027454	Akaike info criterion	-4.236109
Sum squared resid	0.026381	Schwarz criterion	-4.024999
Log likelihood	89.72218	Hannan-Quinn criter.	-4.159778
F-statistic	26.15564	Durbin-Watson stat	2.097589
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Diolah Melalui Eviews 10, Hasil Output R-Squared

Berdasarkan hasil output diatas, nilai dari R-Squared adalah sebesar 0,74 dengan nilai probabilitas F sebesar 0,00. Maka hal tersebut menunjukkan hasil signifikansi adalah kurang dari 0,05 yang berarti bahwa seluruh variabel independen (X), Indeks Pembangunan Manusia (X1), Inflasi (X2), Jumlah penduduk Miskin (X3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y (Ratio Gini) Provinsi Jawa Timur.

b. Uji t Statistik (Secara Parsial)

Uji t statistik dalam ekonometrika, diaplikasikan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial atau individu. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka hasil uji memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05

Manusia dengan Rasio Gini.

A scatter plot showing the relationship between the Gini Ratio (GR) on the x-axis and the Human Development Index (IPM) on the y-axis. The x-axis ranges from 0.20 to 0.44 with increments of 0.04. The y-axis ranges from 60 to 84 with increments of 4. A red diagonal line represents the trend. Data points are blue circles. The plot shows a positive correlation between GR and IPM.

GR	IPM
0.24	64
0.25	61
0.26	62
0.27	67
0.28	60
0.29	67
0.30	63
0.31	64
0.32	63
0.33	69
0.34	64
0.35	78
0.36	70
0.37	72
0.38	70
0.39	76
0.40	74
0.41	80
0.42	78
0.43	78

Scatter Diagram, Hubungan IPM dengan Gini Rasio

Berdasarkan dari hasil gambar grafik *scatter diagram* diatas, dapat dilihat bahwa variabel IPM memiliki hubungan positif dengan Gini Rasio / ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusianya, maka semakin tinggi juga tingkat ketimpangan pendapatannya.

2) Inflasi

Tabel 4.9

Hasil Output Inflasi (X2)

Periods included: 5				
Cross-sections included: 8				
Total panel (balanced) observations: 40				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.085537	0.076838	-1.113215	0.2732
INF	-0.003667	0.001769	-2.073445	0.0456
IPM	0.006083	0.001094	5.562206	0.0000
JPM	-4.39E-06	6.45E-05	-0.068057	0.9461
PT	0.001711	0.003105	0.550841	0.5852

Sumber : Diolah Melalui Eviews 10, Hasil Output Inflasi

Berdasarkan hasil pengujian melalui aplikasi Eviews 10, diketahui bahwa nilai t hitung dari variabel inflasi (X2) adalah sebesar -2,07 dengan probabilitas sebesar 0,04. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga secara individu / parsial variabel inflasi memiliki pengaruh terhadap Gini Rasio / ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Sementara, jika dilihat dari hasil gambar grafik *scatter diagram*, menunjukkan bahwa variabel inflasi dan Gini Rasio memiliki korelasi atau membentuk hubungan negatif. Dimana,

Scatter Diagram, Hubungan Inflasi Dengan Gini Rasio

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

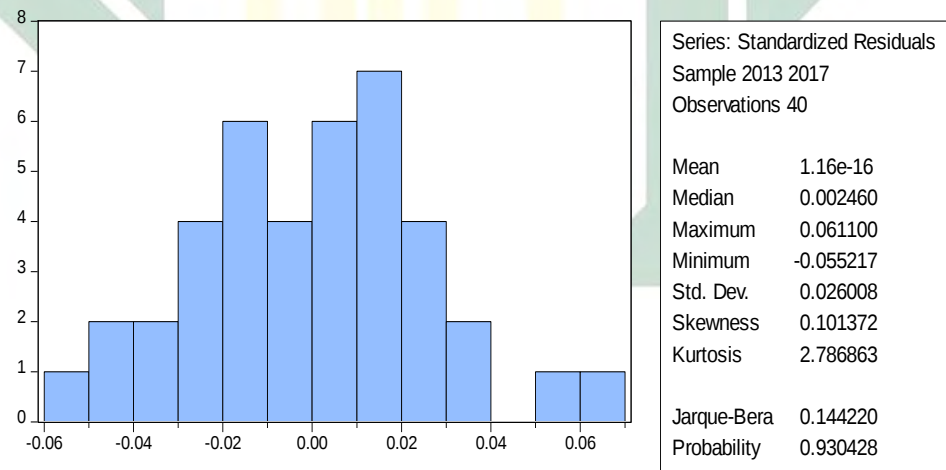
Hasil Output Tingkat Pengangguran Terbuka (X4)

Periods included: 5		
Cross-sections included: 8		

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak.⁵⁸ Untuk mengetahui normal tidaknya suatu data dilihat dari probabilitas Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas Jarque-Bera lebih dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil output uji normalitas.



Gambar 4.11

Hasil Output Uji Normalitas

⁵⁸ Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), Hal.103

Berdasarkan gambar diagram diatas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,93. Sesuai dengan penjelasan diatas, nilai probabilitas Jarque-Bera lebih dari 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau terbebas dari gangguan / masalah.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi antar variabel tersebut, dapat dilihat melalui nilai T (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF), yang mana nilai dari indikator tersebut tidak lebih dari 0,8.⁵⁹

Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen (X) lebih dari 0,8 maka dapat dikatakan bahwa model terkena gangguan atau mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model terbebas dari masalah multikolinearitas. Adapun hasil output uji multikolonieritas dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut.

⁵⁹ Ibid, Hal. 27

Tabel 4.12**Hasil Output Uji Multikolonieritas**

	IPM	JPM	INF	PT
IPM	1	0.7067365638 35271	0.0599023782 3888005	0.6829612960 587506
JPM	0.7067365638 35271	1	0.0295311437 830822	0.4643305155 510077
INF	0.0599023782 3888005	0.0295311437 830822	1	0.1600177901 664417
PT	0.6829612960 587506	0.4643305155 510077	0.1600177901 664417	1

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien dari seluruh variabel independen (X) adalah kurang dari 0.8 sehingga dapat disimpulkan bahwa model data terbebas dari gangguan error atau terhindar dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Heterokesdastisitas

Uji heterokesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan atau perbedaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya perbedaan varian residual dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas lebih 0,05 maka tidak terjadi gangguan atau masalah heterokesdastisitas. Sebaliknya jika nilai

Prob(F-statistic)	0.405562
-------------------	----------

Sumber : Diolah Melalui Eviews 10, Hasil Output Uji Heterokesdatisitas

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas seluruh variabel independen (X) adalah lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model data terhindar dari masalah heteroskedastisitas atau terbebas dari gangguan.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat adanya faktor-faktor kesalahan pengganggu pada periode waktu dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui dan mendeteksi ada tidaknya kesalahan pengganggu antar variabel atau autokorelasi dapat dilihat melalui Uji Durbin - Watson (DW).⁶¹ Berikut adalah tabel Durbin -Watson (DW).

Tabel 4.14

Uji Durbin – Watson (DW)

dl		du	4 - dl		4 - du
Autokorelasi Positif	Tidak Dapat Diputuskan	Bebas Autokorelasi	Tidak Dapat Diputuskan	Autokorelasi Negatif	
0	1,7413	1,7838	2,2587	2,2162	4

Keterangan :

Banyaknya sampel : 40

Banyaknya variabel : 4

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk lolos atau terhindar dari masalah gangguan. Apabila nilai uji Durbin – Watson tidak lebih dari batas yang telah ditentukan yaitu antara 1,7413 dan 2,2587 maka dapat dikatakan bahwa model terhindar dari masalah autokorelasi atau terbebas dari gangguan. Berikut adalah hasil output uji autokorelasi.

$$Y_{GiniRasio} = \beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 INF + \beta_3 JPM + \beta_4 PT + e$$

Berdasarkan hasil pengujian, hasil persamaan model regresi diatas, diketahui bahwa nilai koefisien konstanta yaitu sebesar -0,085. Artinya, dari hasil tersebut terdapat variabel yang mempengaruhi disparitas pendapatan atau Gini Rasio di Provinsi Jawa Timur. Nilai negatif konstanta menunjukkan bahwa diluar empat variabel yang telah dipilih terdapat variabel sistematis yang tidak masuk dalam model, sehingga variabel-variabel tersebut mempengaruhi konstanta negatif. Berikut adalah penjelasan hasil uji secara parsial.

Penjelsan diatas, sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Perroux yang mengatakan bahwa, pemerataan pendapatan tidak dapat terjadi pada semua wilayah secara bersamaan. Sebab setiap wilayah memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada wilayah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, dimana terjadi pembangunan-pembangunan, dan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sehingga yang terjadi, pemerataan pendapatan hanya dapat dirasakan pada wilayah-wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan.⁶²

[illegible]

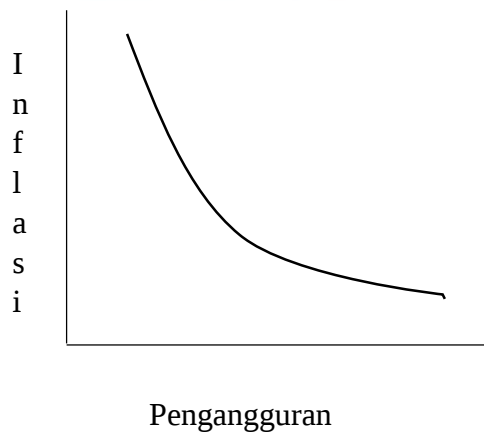
Sejalan dengan hal itu, maka Riska (2015) dalam penelitiannya mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.⁶³ Berpengaruhnya IPM sangatlah penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Tingginya tingkat pembangunan manusia mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut telah berhasil membangun tingkat sumber daya manusianya seperti melalui tingkat pendidikan yang diraih, dan memiliki kesehatan yang baik. Sehingga hal itu akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang akan diperoleh masyarakat.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hanya dirasakan oleh masyarakat tertentu yang berada pada wilayah yang menjadi titik pertumbuhan atau pusat aktivitas ekonomi. Seperti daerah sentra / pusat industri yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tinggi. Demikian, hal itu yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan yang semakin timpang / tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh dan merata pada semua lapisan daerah.

2. Pengaruh Inflasi (X2) terhadap Indeks Ratio Gini Provinsi Jawa Timur

⁶³ Ali Cahyo Birowo, “*Analisis Ketimpangan Perekonomian Di Provinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2012-2016*”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta), Hal 14-15

Hal itu sesuai dengan teori A.W Philips, seorang berkebangsaan London yang melakukan penelitian tentang kondisi perekonomian di Inggris mengenai tingkat upah dan tingkat pengangguran, yang mana teori tersebut dikenal dengan kurva Philips. Berikut adalah gambar kurvanya.



Kurva Philips

Berdasarkan gambar kurva diatas, teori Kurva Philips menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam pendapatnya, Philips mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. Ketika inflasi tinggi, maka produksi barang-barang dan kebutuhan akan ikut meningkat, hal itu diikuti dengan permintaan yang meningkat pula. Terjadinya permintaan yang meningkat akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga pengangguran menjadi turun / rendah.

Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat inflasi maka tingkat pengangguran semakin tinggi. Inflasi yang rendah mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi menurun atau tidak berkembang. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk pemerataan distribusi pendapatan ke semua lapisan daerah. Selain itu, inflasi rendah juga mengakibatkan tingkat permintaan menjadi turun atau tidak adanya produksi barang-barang kebutuhan. Sehingga keadaan tersebut menyebabkan jumlah pengangguran akan semakin bertambah atau meningkat. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat ketimpangan / ketidakmerataan distribusi pendapatan juga akan semakin tinggi / melebar.

dilakukan oleh Benni (2014), yang mengatakan bahwa inflasi tinggi akan dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu daerah. Salah satunya adalah dapat menghambat pemerataan pendapatan. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah.⁶⁴

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin (X3) terhadap Indeks Ratio Gini Provinsi Jawa Timur

Hasil pengujian data menggunakan *eviews* 10, menunjukkan bahwa hasil *t* hitung dari variabel jumlah penduduk miskin (X_3) adalah sebesar -0,068 dengan nilai probabilitas sebesar 0,94. Artinya, nilai signifikansi dari uji tersebut adalah lebih dari 0,05 atau menerima H_0 dan menolak H_1 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan atau Indeks Ratio Gini di Provinsi Jawa Timur. Adapun nilai koefisien model regresi dari variabel jumlah penduduk miskin yaitu sebesar -4,39 yang berarti, apabila jumlah penduduk miskin naik sebesar satu satuan maka Gini Rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar -4,39.

⁶⁴ Benni Ratriadi, “Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten.Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang), Hal.25

Hal itu didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Puti dan Pipit (2017) mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.⁶⁵ Hal itu dikarenakan ketimpangan pendapatan terjadi, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel seperti kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan yang harus dilakukan secara merata pada semua lapisan daerah.

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) terhadap Indeks Ratio Gini Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil pengolahan uji data menggunakan eviews 10, diketahui bahwa nilai t hitung variabel tingkat pengangguran terbuka (X4) yaitu sebesar 0,55 dengan nilai probabilitas sebesar 0,58. Hal itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap Gini Rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Sementara, dilihat dari persamaan model regresi, nilai koefisien dari variabel tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 0,001 yang berarti bahwa apabila tingkat pengangguran terbuka naik sebesar satu satuan, maka

⁶⁵ Puti Andiny, Pipit Mandasari, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh”, Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), Vol.01, No.02, 2017, Hal. 13

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielson dan Alderson (2015) menyatakan bahwa adanya pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

[illegible]

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengujian data melalui aplikasi evIEWS 10, beserta pemaparannya secara rinci, maka dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut.

- [illegible]

- dan diatas, maka penul

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- erintah Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih mem-
rah (kota/kabupaten) yang masih memiliki
akmerataan distribusi pendapatan. Hal itu dilakuk

2. Berdasarkan keempat variabel tersebut, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan pada pembangunan manusia khususnya pada wilayah (kabupaten / kota di Jawa Timur) yang masih tertinggal atau jauh dari pusat kegiatan perekonomian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan laju inflasi serta dapat mengendalikan dan menjaga kestabilan inflasi, sebab inflasi yang baik adalah inflasi yang tetap terjaga kestabilannya. Sementara upaya untuk mengurangi atau meminimalisir tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemberian upah yang layak serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat khususnya di kota / kabupaten Jawa Timur. Sehingga hal itu diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan meminimalisir tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Afini Nur. (2019). Pengaruh PDRB Perkapita Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pemerataan Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Andiny P, Mandasari Pipit. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap ketimpangan Di Provinsi Aceh. Jurnal (Penelitian Ekonomi Akuntansi / JENSI). Vol.01 No.2.

Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta:BPEF.

Atmadja, Adwin. Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Kristen Petra.

Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi Produk Domestik Regional Bruto. Diakses Pada Tanggal 20 November 2019. Pukul 21.07 WIB. Melalui (www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Luas Wilayah Jawa Timur. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 21:07 WIB. (www.jatim.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi kemiskinan. Diakses Pada Tanggal 30 November 2019. Pukul 15:01 WIB. Melalui (www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi Indeks Pembangunan Manusia. Diakses Pada Tanggal 29 November 2019. Pukul 15:32 WIB. Melalui (www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi Pengangguran. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2019. Pukul 14.03 WIB. Melalui (www.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur. Dikases Pada Tanggal 17 Februari 2020. Pukul 21.56 WIB. Melalui (www.jatim.bps.go.id).

Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi Di Jawa Timur Tahun 2018. Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2020. Pukul 23.09 WIB. Melalui (www.jatim.bps.go.id).

Birowo, Ali Cahyo. (2017). Analisis Ketimpangan Perekonomian Di Provinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2012-2016. Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta).

- Boediono. (1992). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Ed.I. Yogyakarta: BPFE.
- Cakrawala, N. Dewa, Et.Al. _____. Statistik Penduduk.
- Darzal. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* Vol.04 No.02.
- Dewata, Linggar. Analisis Pengaruh Ketimpangan Dsitribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007. Skripsi (Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro).
- Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dikutip Pada Tanggal 16 November 2019. Pukul 10:23 WIB. Melalui (<https://pih.kemlu.go.id>)
- Dokumen Pemerintahan Jawa Timur, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020, Pukul 20.45 WIB (www.jatimprov.go.id)
- Ganis, Annisa. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Hariyati, Soetojo A, Hindun. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal (Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan)*. Vol.08 No.3.
- Hidayat, Haris. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro).
- Imam, Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: UNDIP.
- I Komang Oka Yasa. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Mayarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kabul, Ali. M., & Trigunarso, Sri. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok:Kencana.
- KBBI. Definisi Populasi. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2019. Pada Pukul 15:35 WIB Melalui <https://kbbi.web.id>

- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Muhammad & Agustin, Rossy. Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Muljana Slamet. (2008) *Kesadaran Nasional Jilid II : Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta : Lkis.
- Rasyid, Abdurrahman. (2016). Analisis Sektor Potensial Di Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.02, Desember.
- Ratriadi, Benni. (2009). Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Isyimewa Yogyakarta Tahun 2003-2007. Skripsi (Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang).
- Sadono, Sukirno. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT: Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Statistik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jawa Timur I Tahun 2008.
- Susanto B. Aris., & Rachmawati Lucky. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan). Jurnal (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya).
- Todaro, P. Michael. ____ *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-8*.
- Widardjono, Agus. (2017). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.